

**RENCANA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2020**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
I.1    Latar Belakang.....	1
I.2    Landasan Hukum.....	2
I.3    Maksud dan Tujuan.....	3
I.4    Sistematika Penulisan.....	4
BAB II    HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
II.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
II.2    Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	144
II.3    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	16
2.3.1    Analisis Tingkat Kinerja.....	16
2.3.2    Permasalahan.....	16
2.3.3    Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi.....	17
II.4    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	18
BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	19
III.1    Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	19
III.2    Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	21
III.3    Program dan Kegiatan.....	22
BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	29
BAB V    PENUTUP.....	30

## DAFTAR TABEL

Tabel T.7	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (tahun berjalan) Satpol PP Kota Pekalongan .....	7
Tabel T.9	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Satpol PP Kota Pekalongan .....	18
Tabel T.11	Rumusan Rencana Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Satpol PP Kota Pekalongan .....	23

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diimplikasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 27), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan PD untuk periode 1 tahun, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja Perangkat Daerah juga memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan serta mempertimbangkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat.

Berdasarkan aturan tersebut, maka dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan tahunan daerah perlu dibuat Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan tahun 2021 disusun dengan mengacu

pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Pekalongan, rencana strategis SATPOL PP Kota Pekalongan dan RKPD Kota Pekalongan. Penyusunan ini dilakukan melalui proses koordinasi antar seksi di lingkungan SATPOL PP Kota Pekalongan, konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dan OPD terkait di Kota Pekalongan.

## **I.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan tahun 2021 didasarkan kepada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
10. Peraturan Walikota Nomor 84 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
13. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021.

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja SATPOL PP Kota Pekalongan tahun 2021 dimaksudkan untuk dan menyelaraskan prioritas program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja ini juga dimaksudkan untuk melakukan upaya sinkronisasi terhadap program-program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pembangunan daerah pada tahun 2021. Hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah kebijakan pemerintah daerah Kota Pekalongan pada Tahun 2021.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja SATPOL PP adalah :

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan SATPOL PP Kota Pekalongan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (stakeholder) dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketentaman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban SATPOL PP Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentaman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### **I.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021 sesuai Permendagri 40 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**, pada bab ini dibagi menjadi lima bagian pembahasan, yaitu :

- II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;
- II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;
- II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, tantangan dan peluang, dampak terhadap visi/misi kepala daerah dan terhadap capaian program nasional/ internasional serta formulasi isu-isu penting berupa

rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan;

- II.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, diuraikan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota.

**BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH**, pada bab ini pembahasan dibagi menjadi **beberapa** pembagian pembahasan, yaitu :

- III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
- III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah , pada bagian ini, perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;
- III.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program/kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, tabel rencana program dan kegiatan.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, memuat rencana kerja dan pendanaan indikatif perangkat daerah.

**BAB V PENUTUP**, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2021, diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD sampai dengan tahun 2020. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan PD.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu (tahun 2020) Satpol PP dapat disajikan dalam tabel T-7 sebagai berikut :

Tabel T-7 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (tahun berjalan) SATPOL PP Kota Pekalongan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2019 (Tahun lalu / n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2020 (tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (tahun berjalan n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1105	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan surat-menyerurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi	100%					100%		100
1.10.50.01.001	Penyediaan jasa surat menyerurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyerurat	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
1.10.50.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
1.10.50.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
1.10.50.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
1.10.50.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2019 (Tahun lalu / n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2020 (tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (tahun berjalan n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
1.10.50.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
1.10.50.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
1.10.50.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
1.10.50.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
1.10.50.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	80 org/kali	104 org/kali	350 org/kali	192 org/kali	54	200 org/kali	200	100
1105.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>		<b>100</b>
1.10.50.02.003	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun	1 unit	1 unit	-	-	-	1 unit		
1.10.50.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4	jumlah unit tersedianya kendaraan dinas operasional roda 4	1 unit	1 unit	-	-	-	-	1	100
1.10.50.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100	2 unit	2	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2019 (Tahun lalu / n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2020 (tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		8 = (7 / 6)	9
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
1.10.50.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/ berkala	32 unit	32 unit	32 unit	32 unit	100	32 unit	32	100
1.10.50.02.058	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	25 unit	25 unit	44 unit	44 unit	100	4 unit	4	100
1.10.50.02.059	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
1105.03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase kehadiran aparatur</b>	<b>90%</b>					<b>90%</b>		<b>100</b>
1.10.50.03.002	Pengadaan pakaian kerja lapangan	jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	140 stel	140 stel	2384 stel	2380 stel	99,83	207 stel	207	100
1105.06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase ketersediaan Laporan Capaian Kinerja</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>		<b>100</b>
1.10.50.06.005	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100	6 dokumen	6	100
1.10.50.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100	6 dokumen	6	100
1.10.50.06.007	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2019 (Tahun lalu / n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2020 (tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (tahun berjalan n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
1.10.50.06.008	Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
1105.07	<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPM)</b>	<b>Persentase pengaduan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.10.50.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	jumlah tenaga kontrak yang ada	1 org	1 org	2 org	2 org	100	2 org	2 org	100
1.10.50.07.014	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Keterbukaan Informasi Publik, dan Karnaval Batik	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100	3 kali	3 kali	100
1105.16	<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>Persentase penurunan angka kriminalitas (kasus)</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.10.50.16.001	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jml. Pelaksanaan keg. Upacara peringatan HUT Pol PP, Jmabore, Forkonkom, Pelatihan Fisik dan Pelatihan PHH	8 kegiatan	8	13 keg	13 keg	100	6 keg	6 keg	100
1.10.50.16.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah bulan peran serta partisipasi masyarakat dan aparat terkait dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	-	-	-	-	-	145 kali	145 kali	100
1.10.50.16.004	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah kegiatan apel siaga yang terfasilitasi	2 kali	2 kali	9 kali	9 kali	100	3 kali	3 kali	100
1105.24	<b>Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)</b>	<b>Persentase Informasi Barang Cukai Ilegal yang dikoordinasikan untuk ditangani</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2019 (Tahun lalu / n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2020 (tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (tahun berjalan n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
1.10.50.24.001	Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)	Jml. Razia pelaksanaan kegiatan pengumpulan informasi yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	48 razia	48 razia	48 razia	48 razia	100	48 razia	48 razia	100
<b>1105.25</b>	<b>Program Pelayanan Kedaruratan Sipil</b>	<b>Persentase Penanganan Kedaruratan Sipil Non Kebakaran</b>	-	-	-	-	-	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		<b>Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai dengan SPM</b>	-	-	-	-	-	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.10.50.25.001	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jml. Keg. Pelaksanaan pengamanan wilayah dalam rangka hari besar keagamaan, natal dan tahun baru serta kegiatan operasional linmas	16 kegiatan	16 kegiatan	47 kegiatan	47 kegiatan	100	-	-	100
		Jumlah kegiatan PAM Lebaran, Syawalan, Natal dan tahun Baru serta kegiatan operasional Linmas yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	40 kali	40 kali	100
		Jumlah hari PAM Obvit yang dilaksanakan	-	-	270 kali	270 kali	100	180 kali	180	100
		Jumlah hari Piket Posko Bencana Alam (PBA) yang dilaksanakan	-	-	90 hari	90 hari	100	60 hari	60 hari	100
1.10.50.25.002	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah pelaksanaan kegiatan sarasehan kantrantibmas dan KST dalam rangka komunikasi dan pemberdayaan masyarakat	24 kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan	100	-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2016- 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2019 (Tahun lalu / n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2020 (tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		8 = (7 / 6)	Target Renja PD tahun 2020 (n-1)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
		Jumlah kegiatan pengendalian keamanan yang dilaksanakan	-	-	90 keg	71 keg	78,89	-	-	78,89
1.10.50.25.003	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	25 kejadian	25 kejadian	25 kejadian	49 kejadian	196	25 kejadian	25 kejadian	100
		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	5 kali	5 kali	100
		Jumlah latihan damkar yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	3 kali	3 kali	100
		Jumlah peserta yang mengikuti diklat damkar	-	-	-	-	-	2 org	2 org	100
		Jumlah lemari yang diadakan	-	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100
		Jumlah baju tahan panas yang diadakan	-	-	-	-	-	8 buah	8 buah	100
		Jumlah tenda pemadam kebakaran yang diadakan	-	-	-	-	-	2 buah	2 buah	100
		Jumlah LCD proyektor yang diadakan	-	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100
		Jumlah handy talky yang diadakan	-	-	-	-	-	4 unit	4 unit	100
		Jumlah pemeliharaan mobil berat yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2019 (Tahun lalu / n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2020 (tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (tahun berjalan n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
1.10.50.25.004	Pengamanan pemilihan umum	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pengamanan pemilihan presiden dan legislatif yang kondusif, aman dan tertib	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	100	7 bulan	7 bulan	100
<b>1105.26</b>	<b>Program peningkatan kepatuhan aparat, badan usaha/hukum dan masyarakat pada produk hukum daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian pelanggaran perda yang dilaporkan</b>	-	-	-	-	-	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.10.50.26.001	Penegakan Perda dan Keputusan Walikota	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan operasi penegakan perda dan perwal di wilayah Kota Pekalongan	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	-	100-
		Jumlah pelaksanaan kegiatan operasi pekat, PGOT, reklame dan sarasehan serta pengumpulan data dan informasi	-	-	252 kali	252 kali	100	-	-	100
		Jumlah operasi Pekat, reklame dan PGOT yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	192 kali	192 kali	100
		Jumlah kegiatan intelegen yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	72 kali	72 kali	100
		Jumlah sosialisasi Perda dan Perkada yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	27 kali	27 kali	100
		Jumlah penindakan yustisial/non yustisial yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	48 kali	48 kali	100
		Jumlah kegiatan pembinaan dan rakor sekretariat PPNS yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	4 kali	4 kali	100

## II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Norma Standar Pelayanan Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang ketentraman, ketertibaman umum dan perlindungan masyarakat, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada SATPOL PP Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja utama Rencana Stategis SATPOL PP Kota Pekalongan.

Kinerja pelayanan SATPOL PP Kota Pekalongan dapat dilihat pada capaian pelaksanaan tugas pokoknya memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang ketentraman, ketertibaman umum dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan data Hasil Evaluasi LKjIP tahun 2020, realisasi capaian kinerja adalah sebagai berikut :

➤ ***Analisis Sasaran : Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda***

Analisis Pencapaian Sasaran  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Persentase penanganan kedaruratan sipil non kebakaran	%	100	100
2	Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai dengan SPM	%	100	100
2	Cakupan kelompok sasaran tibum yang dibina	%	50	44,44
3	Persentase informasi barang cukai illegal yang dikoordinasikan untuk ditangani	%	100	100
4	Persentase penyelesaian pelanggaran perda	%	100	97,49
TOTAL PERSENTASE				97,27

Sasaran meningkatnya meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda pada tahun 2019 tercapai 97,27% (**sangat baik**) karena optimalisasi pelaksanaan tugas Satpol PP meliputi Penegekan Perda, Sosialisasi penertiban

PK5, Sosialisasi dan pengumpulan data terkait cukai illegal serta penanganan bantuan kedaruratan sipil non kebakaran dan bahaya kebakaran.

➤ **Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100	98,31

Sasaran menurunnya kasus kebakaran karena human error tercapai 98,31% (**Sangat Baik**). *Alhamdulillah* semua laporan capaian kinerja telah dapat diselesaikan dengan baik.

➤ **Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	%	100	98,25
2	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas/operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	%	100	95,53
3	Persentase kehadiran	%	100	99,60
<b>TOTAL PERSENTASE</b>				<b>97,79</b>

Sasaran terwujudnya nilai-nilai demokrasi melalui pendekatan partisipatif untuk membentuk masyarakat madani tercapai 97,79% (**Sangat Baik**). Kegiatan operasional kantor, pemeliharaan dan pengadaan telah dilaksanakan dengan baik

## **II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### **2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja**

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertibaman umum dan perlindungan masyarakat pada Pemerintah Kota Pekalongan, SATPOL PP Kota Pekalongan telah menyusun program kerja dan kegiatan dalam Rencana Strategis yang memuat tugas pokok dan fungsi dan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Dalam RPJMD tersebut, SATPOL PP Kota Pekalongan mendukung pencapaian misi “Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat” dengan Tujuan “Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis TI”.

Dalam pencapaian tujuan “Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis TI”, sasaran “Meningkatnya Penegakan Perda”, dengan Indikator Kinerja “Persentase Penegakan Perda”. Capaian Indikator Kinerja tersebut pada tahun 2018 sebesar 94%.

### **2.3.2 Permasalahan**

Selama menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Rendahnya kepatuhan hukum dan pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berlaku;
2. Faktor Ekonomi dengan adanya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang membuat masyarakat beralih menjadi pedagang pasar tiban/PK5;
3. Terbatasnya lahan tempat berjualan bagi pedagang pasar tiban/PK5;
4. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
5. Belum optimalnya koordinasi internal antar seksi;
6. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
7. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP);
8. Belum optimalnya peran PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam melaksanakan tupoksinya;
9. Belum optimalnya koordinasi antar Aparat Penegak Hukum dan stakeholder terkait (SATPOL PP, POLRI, TNI, Kejaksaan, Bag.Hukum, Kesbangpol, Bea Cukai).

### **2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi**

Menjaga ketentraman, ketertibaman umum dan perlindungan masyarakat yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal ini SATPOL PP Kota Pekalongan memegang peranan dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja pencapaian tujuan pemerintah. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja terbaik SATPOL PP Kota Pekalongan akan berdampak langsung pada kinerja yang telah ditetapkan.

Terkait dengan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021, kinerja SATPOL PP Kota Pekalongan berdampak pada pencapaian misi “Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”.

#### II.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyusunan program dan kegiatan terlebih dahulu menampung aspirasi masyarakat dari pemangku kepentingan, baik dari OPD terkait, kelompok masyarakat Kota Pekalongan yang langsung ditujukan kepada Perangkat daerah dan juga hasil tinjauan kelapangan.

Berdasarkan hasil rumusan dari pemangku kepentingan tersebut dilakukan penyesuaian dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah sekaligus merupakan program dan kegiatan yang merupakan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

Akan tetapi pada Musrenbang Kota, Belum ada usulan dari pemangku kepentingan, baik dari SKPD terkait, kelompok masyarakat Kota Pekalongan

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat disajikan dalam tabel T-9 sebagaimana terlampir.

Tabel T.9 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021 SATPOL PP Kota Pekalongan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>NIHIL</b>				

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan nasional merupakan acuan utama bagi setiap daerah propinsi dan kabupaten kota dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Arah kebijaksanaan pembangunan daerah kota harus didasari oleh visi dan misi daerah dan output akhirnya berupa pola dasar pembangunan daerah.

Kebijakan Pemerintah tentang Satpol PP tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dimana dalam PP tersebut dijelaskan mengenai tugas Satpol PP yaitu menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan dalam rencana program dan kegiatan didasari kepada Melindungi Segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara. Disini Satpol PP berperan serta dalam proses melindungi segenap bangsa dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Pekalongan. Selanjutnya penjabaran program dan kegiatan yang menyangkut ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara konkrit dituangkan dalam bentuk rencana kerja tahunan dan operasionalnya dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 84 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), Satpol PP menyelenggarakan fungsi

- a. perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- b. perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- c. penyelenggaraan kebijakan teknis penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;

- d. pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- e. pembinaan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pencegahan kebakaran;
- f. pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat atas permasalahan yang berhubungan dengan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. pembinaan dan fasilitasi kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- h. penyelenggaraan pengawasan kepatuhan masyarakat, badan hukum dan aparatur terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota;
- i. pengkoordinasian dengan instansi terkait dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam penindakan secara yustisial atas pelanggaran peraturan daerah;
- j. pengarahan penyelenggaraan administrasi umum meliputi : penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perjalanan dinas, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan, dokumentasi dan kearsipan;
- k. pengkoordinasian penerapan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- l. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang terjadi di kawasan perkotaan;
- m. penyelenggaraan kerjasama dengan pemadam kebakaran pada pemerintah daerah sekitar guna melaksanakan pemadaman kebakaran;
- n. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
- o. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- p. pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran tujuan Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SATPOL PP Kota Pekalongan serta identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai sesuai tujuan organisasi.

Adapun tujuan dan sasaran SATPOL PP Kota Pekalongan, telah dirumuskan sebagai berikut:

1. a. Tujuan : Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah
  - a. Sasaran : Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas Penegakan Perda
2. a. Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik
  - b. Sasaran : 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja  
2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran SATPOL PP Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2020 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing seksi selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat sebagai berikut.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah		1. persentase kawasan patuh perda	100%
		a. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda	a. Berkurangnya pelanggaran Perda b. Waktu respon penanganan kebakaran	500 kasus 15 menit
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	
		a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja	a. Nilai Evaluasi AKIP	72,5

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	
		b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	b. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	1000

### III.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Rencana kerja tahun 2021 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas untuk mewujudkan tujuan dan sasarannya. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2020. Pada prinsipnya program dan kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas sesuai pagu indikatif yang ditetapkan.

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebanyak 9 program dan 32 kegiatan dengan jumlah pagu Rp. 17.464.036.280,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut dapat dilihat pada tabel T.11 sebagai berikut :

Tabel T.11 Rumusan Rencana Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 SATPOL PP Kota Pekalongan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17.464.036.280		
1105	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				17.464.036.280		
1105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 : Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi	Kota Pekalongan	100 persen	568.240.000	DAU	
1105.110502.00.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Pekalongan	12 bulan	2.800.000	DAU	
1105.110502.00.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Kota Pekalongan	12 bulan	124.840.000	DAU	
1105.110502.00.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Pekalongan	12 bulan	51.600.000	DAU	
1105.110502.00.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	Kota Pekalongan	12 bulan	25.000.000	DAU	
1105.110502.00.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Pekalongan	12 bulan	10.000.000	DAU	
1105.110502.00.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Pekalongan	12 bulan	10.000.000	DAU	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1105.110502.00.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Pekalongan	12 bulan	12.500.000	DAU	
1105.110502.00.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	Kota Pekalongan	12 bulan	2.500.000	DAU	
1105.110502.00.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Kota Pekalongan	12 bulan	104.000.000	DAU	
1105.110502.00.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Kota Pekalongan	200 org/kali	225.000.000	DAU	
<b>1105.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1 : Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>100 persen</b>	<b>2.863.100.000</b>	<b>DAU</b>	
1105.110502.00.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung/bangunan yang dibangun	Kota Pekalongan	1 unit	600.000.000	DAU	
1105.110502.00.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Kota Pekalongan	2 unit	900.000.000	DAU	
1105.110502.00.02.011	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang diadakan	Kota Pekalongan	3 unit	150.000.000	DAU	
1105.110502.00.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Kota Pekalongan	2 unit	100.000.000	DAU	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1105.110502.00.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	Kota Pekalongan	30 unit	430.000.000	DAU	
1105.110502.00.02.058	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Kota Pekalongan	10 unit	653.100.000	DAU	
1105.110502.00.02.059	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kota Pekalongan	12 bulan	30.000.000	DAU	
<b>1105.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>1 : Persentase kehadiran aparatur</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>90 persen</b>	<b>550.000.000</b>	<b>DAU</b>	
1105.110501.03.003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	Kota Pekalongan	400 stel	550.000.000	DAU	
<b>1105.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>1 : Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>100 persen</b>	<b>60.000.000</b>	<b>DAU</b>	
1105.110502.00.06.005	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	Kota Pekalongan	6 dokumen	8.000.000	DAU	
1105.110502.00.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun	Kota Pekalongan	6 dokumen	8.000.000	DAU	
1105.110501.06.007	Penyusunan profil perangkat daerah	Jumlah dokumen profil bidang tibum dan linmas yang disusun	Kota Pekalongan	1 dokumen	10.500.000	DAU	
1105.110502.00.06.008	Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	12 bulan	23.500.000	DAU	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1105.110502.00.06.009	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah buku Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	Kota Pekalongan	5 buku	10.000.000	DAU	
<b>1105.07</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)</b>	<b>1 : Pengaduan yang diterima</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>0 persen</b>	<b>78.280.000</b>	<b>DAU</b>	
1105.110501.15.004	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	2 org/bulan	63.280.000	DAU	
1105.110502.00.07.014	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Keterbukaan Informasi Publik, dan Karnaval Batik	Kota Pekalongan	3 kali	15.000.000	DAU	
<b>1105.28</b>	<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>1. Cakupan kelompok sasaran tibum yang dibina</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>100%</b>	<b>1.023.570.000</b>	<b>DAU</b>	
1105.110501.16.001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah kegiatan upacara HUT Pol PP, Jmabore, Pelatihan SDM dan Pelatihan Penanggulangan Huru-Hara yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	6 kegiatan	178.285.000	DAU	
1105.110501.16.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah kegiatan sarasahan tibum tranmas, PAM Insidental, Operasi KST dan PAM Terpadu	Kota Pekalongan	150 kegiatan	618.285.000	DAU	
1105.110501.16.004	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah kegiatan Bintek Tibumtranmas, BintekPerundang-undangan, Evaluasi Banpol danPelatihan fisik/Kesamaptaa/Beladiri yangdilaksanakan	Kota Pekalongan	4 kegiatan	227.000.000	DAU	
<b>1105.24</b>	<b>Program pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)</b>	<b>1. Persentase Informasi Barang Cukai Ilegal yang dikoordinasikan untuk ditangani</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>100%</b>	<b>140.000.000</b>	<b>DAU</b>	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1105.110501.24.001	Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)	Jumlah razia pelaksanaan kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	Kota Pekalongan	48 Razia	140.000.000	DAU	
<b>1105.25</b>	<b>Program pelayanan kedaruratan sipil</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Persentase Penanganan Kedaruratan Sipil Non Kebakaran</b></li> <li><b>Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai dengan SPM</b></li> </ol>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>100%</b>  <b>100%</b>	<b>6.538.585.000</b>	<b>DAU</b>	
1105.110501.25.001	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kegiatan PAM Lebaran, Syawalan, Natal dan Tahun Baru serta kegiatan operasional Linmas yang dilaksanakan</li> <li>Jumlah hari PAM Obvit yang dilaksanakan</li> <li>Jumlah hari piket posko bencana alam (PBA) yang dilaksanakan</li> </ul>	Kota Pekalongan	44 kegiatan  365 hari  60 hari	2.127.725.000	DAU	
1105.110501.25.003	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran yang tertangani	Kota Pekalongan	25 kejadian	4.410.860.000	DAU	
<b>1105.26</b>	<b>Program peningkatan kepatuhan aparatur, badan usaha/hukum dan masyarakat pada produk hukum daerah</b>	<b>1. Persentase penyelesaian pelanggaran perda yang dilaporkan</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>100%</b>	<b>5.642.261.280</b>	<b>DAU</b>	
1105.110501.26.001	Penegakan Perda dan Keputusan Walikota	Jumlah Operasi Pekat, Reklame dan PGOT yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	192 kali	5.642.261.280	DAU	
		Jumlah kegiatan intelejen yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	72 kali			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah Sosialisasi Perda dan Perkada yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	27 kali			
		Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti diksar	Kota Pekalongan	30 orang			
		Jumlah penindakan yustisial/non yustisial yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	48 kali			
		Jumlah kegiatan pembinaan dan rakor sekretariat PPNS yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	4 kali			
		Jumlah papan pengumuman yang diadakan	Kota Pekalongan	4 buah			

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Perumusan rencana program dan kegiatan SATPOL PP Kota Pekalongan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kota Pekalongan yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama SATPOL PP Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kota Pekalongan adalah :

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
2. Program Pelayanan Kedaruratan Sipil
3. Program peningkatan kepatuhan aparatur, badan usaha/hukum dan masyarakat pada produk hukum daerah

Indikator kinerja dari program tersebut menjadi tanggung jawab SATPOL PP Kota Pekalongan dalam evaluasi RKPD dan LKPJ.

Dalam Renja SATPOL PP Kota Pekalongan Tahun 2021 terdapat 9 Program dan 32 kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh kegiatan SATPOL PP Kota Pekalongan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (RENJA) SATPOL PP Kota Pekalongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja SATPOL PP. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf SATPOL PP Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diamanahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu Perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Semoga Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2021. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Pekalongan, 29 Juli 2020

Kepala Pelaksana,  
SATPOL PP KOTA PEKALONGAN

  
Dr. SRIBUDI SANTOSO, M.Si  
NIP. 19701214 199003 1 004